

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister S-2



Disusun oleh :

Mia Rizki

NIM. 14020122420022

**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TAHUN 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 10 September 2024



Mia Rizki

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI

TESIS
Disusun Oleh:
MIA RIZKI
14020122420022

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 September 2024

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I



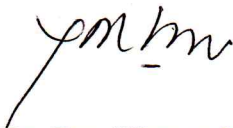
Dr. Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si.
NIP. 196708151994012001

Pembimbing II



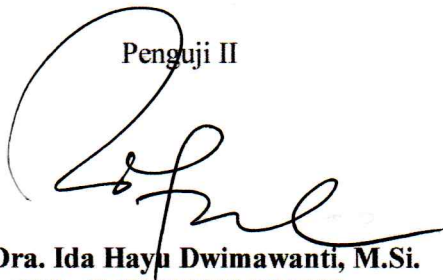
Prof. Dr. Dra. Endang Larasati Setianingsih, M.S
NIP. 195706181983032001

Penguji I



Dr. Dra. Kismartini, M.Si
NIP. 196103281986032001

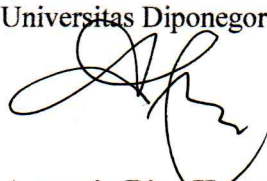
Penguji II



Dr. Dra. Ida Hayu Dwimawanti, M.Si.
NIP. 196708191994032003

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
(M.A.P)

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik
Universitas Diponegoro



Dr. Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si.
NIP. 196708151994012001

Abstract

The Globalization gave birth to the industrial revolution 4.0 which has an impact on digital-based government in Indonesia. Digital Population Identity is a digital transformation of public services in the field of population administration guided by Minister of Home Affairs Regulation no. 72 of 2022. Implementation of the Digital Population Identity policy at the Wonogiri District Department of Population and Civil Registration has made various efforts to increase the percentage but has not been able to reach the national target of 30%. This study aims to analyze the implementation of the Digital Population Identity policy in the Wonogiri District Department of Population and Civil Registration and analyze the obstacles faced in implementing the Digital Population Identity policy in the Wonogiri District Department of Population and Civil Registration. The research uses the policy implementation theory of Donald Van Meter and Carel Van Horn. Qualitative research methods. Data comes from literature and field studies through observation, interviews and documentation. Research findings show that the implementation of Digital Population Identity has not been optimal, seen from (1) Qualifications of the Implementer, (2) Equipment/Equipment, (3) Recording and Data Collection, (4) Process of implementing Digital Population Identity (1) Human Resources, (2) Communication, (3) Characteristics and activities of the implementer, (4) socio-political economic conditions, (5) implementor disposition. Research suggestions. (1) The Wonogiri Regency Dukcapil Office needs to collect data for villages below the national target by optimizing village counters and providing assistance to village officials. (2) The Central Java Province needs to collaborate on the use of Digital Population Identity in various public services. (3) Wonogiri Regency Dukcapil Office needs to discipline staff to be responsive to Digital Population Identity services to applicants.

Keywords: Policy Implementation, Digital Population Identity, Digitalization.

Abstrak

Globalisasi melahirkan revolusi industri 4.0 yang berdampak pada pemerintahan berbasis digital di Indonesia, Identitas Kependudukan Digital merupakan transformasi digital pada pelayanan publik bidang administrasi kependudukan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2022. Dalam pengimplementasian kebijakan Identitas Kependudukan Digital, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri telah melakukan berbagai upaya peningkatan persentase namun belum dapat mencapai target nasional 30%. Kajian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carel Van Horn. Metode penelitian kualitatif. Data bersumber dari kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan implementasi Identitas Kependudukan Digital belum maksimal, dilihat dari (1) Kualifikasi Pelaksana, (2) Peralatan/Perlengkapan, (3) Pencatatan dan Pendataan, (4) Proses pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (1) SDM, (2) Komunikasi, (3) Karakteristik dan kegiatan pelaksana, (4) Kondisi ekonomi sosial politik, (5) Disposisi implementor. Saran penelitian. (1) Disdukcapil Kabupaten Wonogiri perlu melakukan pendataan untuk desa di bawah target nasional dengan mengoptimalkan loket desa serta memberikan pendampingan kepada perangkat desa. (2) Pihak Provinsi Jawa Tengah perlu menjalin kerjasama pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital di berbagai layanan publik. (3) Disdukcapil Kabupaten Wonogiri perlu mendisiplinkan staff untuk responsive terhadap pelayanan Identitas Kependudukan Digital kepada pemohon.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital, Digitalisasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang hingga saat ini masih senantiasa memberikan limpahan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri”. Tesis ini ditulis untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik pada Prodi S-2 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses penyelesaian Tesis ini hingga selesainya laporan Tugas Akhir. Dengan ketulusan hati dan tidak mengurangi rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
2. Dr. Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik sekaligus Dosen Pembimbing Tesis atas dukungan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan Tesis, serta sebagai ketua dewan penguji.
3. Prof. Dr. Endang Larasati Setianingsih, M.S., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh kasih telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi penulis dalam penyusunan Tesis, serta sebagai sekretaris dewan penguji.
4. Dr. Dra. Kismartini, M.Si., selaku anggota dewan penguji yang dengan penuh kasih memberikan masukan berharga bagi penyempurnaan Tesis ini,
5. Dr. Dra. Ida Hayu Dwimawanti, M.Si., selaku anggota dewan penguji yang penuh kasih memberikan masukan berharga bagi penyempurnaan Tesis ini.
6. Herdian. S.IP, M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis, pembaca serta pihak-pihak terkait.

Semarang, 18 September 2024

Mia Rizki

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Keaslian Penelitian.....	9
1.3 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah.....	9
1.3.1 Identifikasi Masalah	9
1.3.2 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.6 Penelitian Terdahulu	11
1.7 Kajian Teori	18
1.7.1 Administrasi Publik.....	18
1.7.2 Kebijakan Publik.....	21
1.7.3 Implementasi Kebijakan.....	22
1.8 Kerangka Pemikiran.....	33
1.9 Pendekatan Penelitian	35
1.10 Tipe Penelitian	35
1.11 Fokus Penelitian.....	35
1.12 Lokasi Penelitian.....	36
1.13 Operasionalisasi Konsep	36
1.14 Fenomena Penelitian	38
1.15 Jenis dan Sumber Data	39
1.16 Pemilihan Informan.....	40
1.17 Instrumen Penelitian.....	41
1.18 Teknik Pengumpulan Data	41
1.19 Teknik Analisis Data	43
BAB II	46
GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN	46
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri.....	46
2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Wonogiri	47

2.1.2 Kependudukan Kabupaten Wonogiri	47
2.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri	48
2.2.1 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.....	48
2.2.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri .	50
2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi	51
2.2.4 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri	52
2.3 Kebijakan Identitas Kependudukan Digital.....	54
BAB III	59
HASIL PENELITIAN.....	59
3.1 Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.....	59
3.1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)	60
3.2 Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri	72
3.2.1 Sumber Daya.....	72
3.2.1.1 Sumber Daya Manusia	72
3.2.2 Komunikasi dan Kegiatan Pelaksana.....	74
3.2.3 Karakteristik Agen Pelaksana.....	79
3.2.4 Kondisi Ekonomi Sosial Politik	81
3.2.5 Disposisi Implementor	86
BAB IV	89
ANALISIS/PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	89
4.1 Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.....	89
4.1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP).....	90
4.2 Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri	96
4.2.1 Sumber Daya.....	96
4.2.1.1 Sumber Daya Manusia	96
4.2.1.2 Sumber Daya Material.....	97
4.2.2 Komunikasi	97
4.2.3 Karakteristik agen pelaksana	100
4.2.4 Kondisi Ekonomi Sosial Politik	102
4.2.5 Disposisi Implementor	105
BAB V	108

PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111